

**PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN
TEMPAT IBADAH DI
DESA WANGA KECAMATAN MOTOLING TIMUR
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**INDAH LIDIA LENDO
ALDEN LALOMA
WELSON YAPPY ROMPAS**

This study aims To find out how the supervision on the implementation of aid programs construction of places of worship in the Village Wanga District Motoling Timur South Minahasa

This research uses descriptive research method with qualitative approach. By applying a qualitative approach the authors have a wider opportunity in interacting with the object of research, so as to enrich and deepen the study in research that the author do Data Collection Techniques used some Interview techniques, Documentation study, Observation

The results show the actual performance is smaller than the standard or in other words that what is done by the development commission in the congregation of GMIM Sion wanga village has not reached as expected

Keywords: Supervision, Development Assistance Program Place of Worship

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 mengamankan bahwa Negara wajib melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan

Untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, di samping diperlukan system perencanaan yang baik dan mampu mengantisipasi efektifitas pelaksanaan rencana, juga diperlukan system pelaksanaan dan pengawasan yang mantap dan mampu menjamin efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan. System pelaksanaan tersebut bersama system pelaksanaan dan pengawasann merupakan bagian dari system manajemen pembangunan sebagai wahana dalam mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan nasional.

Dalam hubungan ini, system pelaksanaan pembangua yang dimaksudkan adalah yang menyangkut program pembangunan yang dibiayai anggaran Negara, termasuk di dalamnya kebijaksanaan serta

prosedur yang mendukung keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Untuk mengamankan pelaksanaan pembangunan dan agar tujuan serta sasaran pembangunan tercapai secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundangundangan, dikembangkan dan didayagunakan system pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Pengawasan pembangunan perlu dilaksanakan guna mengefektifkan dan mengoptimalkan pemanfaatan resorsis, terutama sumber daya pembiayaan pembangunan. Dengan system pengawasan yang efektif dan transparan, maka diharapkan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber daya pembangunan terutama pembiayaan pembangua dapat terserap secara optimal. Oleh karena itu, peranan pengawasan pembangunan baik pengawasan internal maupun pengawasan fungsional mendapat perhatian yang sangat serius, disamping dapat meminimalisir tindak kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dapat terminimalisir.

Pengawasan dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan

desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang paling penting adalah pengawasan dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari Negara ini. Pengawasan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai pengawasan masyarakat dan factor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan serta kondisi pengawasan masyarakat dan factor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

Pengawasan masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yang ada di desa, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa pengawasan dari masyarakat untuk setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan diri dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Dalam kaitan ini, salah satu program pemerintah dibidang social yang mendapat perhatian serius yaitu program bantuan social di bidang keagamaan seperti bantuan tempat ibadah sebagaimana tercantum Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Pada bidang ini, memang sangat rawan terjadinya tindak penyimpangan atau korupsi sehingga membutuhkan peran pengawasan yang optimal. Namun demikian sejauh diketahui, masih saja terjadi tindak penyimpangan yang dilakukan oknum, baik masyarakat sebagai pengurus sebuah tempat ibadah maupun pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut. Kondisi

atau realitas ini tidak terkecuali terjadi di lingkungan masyarakat dan pemerintah termasuk didalamnya organisasi gereja di Desa Wanga Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan yang menghimpun dana masyarakat serta bantuan lainnya guna menunjang pembangunan tempat ibadah. Dimana dalam penggunaan dana pembangunan sering terjadi kebocoran alias tidak jelas pemanfaatannya sehingga tidak jarang menimbulkan gesekan antara pemimpin dengan panitia pelaksana bahkan juga dengan jemaat setempat. Hal ini disebabkan karena timbul rasa kecurigaan di antara satu dengan yang lainnya akibat tidak dijalkannya system dana pengawasan yang transparan dan akuntabel atau dengan kata lain pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Dalam konteks inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengawasan Pada Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Tempat Ibadah di Desa Wanga Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan” pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unsrat Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep pengawasan

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dengan ilmu manajemen dengan ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R Terry berpendapat bahwa istilah “control” sebagaimana dikutip Muchsan, artinya : “control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective meansures, if needed to ensure result in keeping with the plan” (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi da menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana) (Muchsan dalam Siswanto Sunarno, 2005 : 97).

Muchsan (1992 : 38) berpendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk

menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan).

FUNGSI DAN PENGAWASAN

Sebagai suatu pengendalian manajemen yang hebat dalam menyelesaikan tanggungjawabnya secara efektif, maka fungsi pengawasan adalah :

1. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif
2. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
3. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
5. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Oleh karena itu internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengetahui apakah sistem pengendalian yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh keadaan sebenarnya.

JENIS PENGAWASAN

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Pengawasan Intern dan Ekstern
Pengawasan intern dan ekstern ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan." Pengawasan dalam

bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam negeri.

2. Pengawasan Preventif dan Represif
Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh alasan langsung. Sehingga penyimpangan yang kemungkinan akan terdeteksi lebih awal. Di sisi lain, pengawasan represif adalah "pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan." Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.
3. Pengawasan Aktif dan Pasif
Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk "pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan." Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan

pengawasan melalui "penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran." Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah "pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya", Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah "pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin."

4. Pengawasan Formil dan Materil

Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*). Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditunjukan untuk menghindari terjadinya "korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri." Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat dijalankan sebagaimana direncanakan.

Konsep Pembangunan

Menurut Soetomo (2008), pembangunan sebagai proses perubahan dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis, bukan dilihat sebagai konsep statis yang selama ini sering kita anggap sebagai suatu kesalahan yang wajar. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir.

"Development is not a static concept. It is continuously changing". Artinya juga bisa dikatakan bahwa pembangunan ini sebagai *"never ending goal"*. Proses pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri (*self sustaining proces*) tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belakan.

Pembangunan tergantung dari suatu "innerwill" dan proses emansipasi diri, dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin karena proses pendewasaan (*Tjokroamidjojo dan Mustapadijaja dalam Namwi 2009*).

Menurut Rogers dalam Zulkarimen Nasution (2004), pembangunan diartikan sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan system sosial, sedangkan modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu. yang paling sering, walaupun kedua pengertian istilah tersebut dibedakan, maka pembangunan dimaksudkan yang terjadi pada bidang ekonomi, atau lebih mencakup seluruh proses analog dan seiring dengan itu, dalam masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai suatu istilah teknis, pembangunan berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dari keadaan kemiskinan, tingkat melek huruf (*literacy rate*) yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan sosial (Steers dalam Zulkarimen Nasution, 2004 Menurut Seers dalam Zulkarimen Nasution (2004).

Menurut Sondang P. Siagian (2008), pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif penulis mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam berinteraksi dengan objek penelitian, sehingga dapat memperkaya dan memperdalam kajian dalam penelitian yang penulis lakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution (2001) bahwa dalam penelitian kuantitatif data dituangkan secara laporan dan uraian". Penelitian menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti (Sugiyono,2009).

Fokus Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi focus penelitian ini adalah pada dimensi pengawasan internal yaitu pengawasan dalam pelaksanaan program bantuan pembangunan tempat ibadah Desa Sawangan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan dimana pengawasan ini dilaksanakan untuk mengetahui penggunaan sumber – sumber fisik, financial manusia dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi. Indicator yang dapat mengukur pengawasan yaitu : ukuran/standar pekerjaan,penilaian pekerjaan,perbandingan antara hasil pekerjaan dengan ukuran atau standar pekerjaan,perbaikan atas penyimpangan.

Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diminta kesediaanya untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, dia harus punya banyak pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar mengetahui pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian (Moleong, 2001 : I 3) Informan yang akan di wawancarai sebanyak 10 orang, terdiri :

1. Pengurus Lembaga Keagamaan / tempat ibadah : 3 orang

(Ketua Jemaat, Sekertaris dan Bendahara)

2. Komisi / Panitia Pembangunan : 3 orang
3. Kepala Desa : 1 orang
4. Tokoh Masyarakat / Agama : 3 orang

Tehnik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan menghadapi sejumlah besar sumber-sumber data yang berupa buku kepustakaan. Pertama-pertama yang harus dilakukan peneliti adalah menentukan lokasi-lokasi sumber data serta pusat-pusat studi. Setelah menentukan lokasi sumber data, mulailah melakukan pengumpulan data (Kaelan, 2012:163).

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah dari tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama. Atas pertimbangan inilah maka pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik sebagai berikut :

1. Wawancara (interview) : Wawancara dilakukan pada informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara sebagai panduan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsistensi hasil penelitiannya.
2. Studi dokumentasi : Studi dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder pendukung data primer hasil wawancara. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen – dokumen yang telah tersedia di kantor desa
3. Observasi : untuk memperoleh informasi serca gambaran empirik tentang data yang diperlukan dengan mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Pendekatan dalam metode analisis ini adalah dengan menggunakan analisis interaktif (interaktif model of analyze) yang menurut Milles dan Huberman (1994:20) adalah selama proses pengumpulan data penelitian harus siap bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pmgumpulan data sela4iutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari sejumlah fungsi dan manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah dikakukan dengan baik. Oleh karena begitu pentingnya fungsi pengawasan maka dalam pembahasan ini akan diuraikan beberapa elemen dasar yang sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu Penetapan standar kinerja .standar secara singkat dapat diartikan sebagai kriteria sederhana tentang kinerja juga dapat diartikan sebagai satu nilai yang digunakan sebagai titik referensi untuk membandingkannya dengan nilai lain. Ia merupakan basis perbandingan bagi pengukuran sejauh mana kinerja organisasional memuaskan atau tidak memuaskan. Jadi standar adalah satu kriteria tentang hasil yang diinginkan atau peristiwa yang diharapkan dengan mana manajer dapat membandingkan subsekuensi kegiatan, pelaksanaan dan hasil kerja, atau pembukaan yang terjadi dalam pencapaian tujuan.

Standar adalah target dari kinerja menetapkan suatu standar, akan memberi suatu nilai atau petunjuk yang menjadi suatu ukuran atau model sehingga hasil –hasil yang nyata dapat dibandingkan. Untuk itu objek-objek yang akan dikendalikan perlu ditentukan dengan skala prioritas sesuai dengan urgenitas proses pelaksanaan suatu rencana atau faktor-faktor strategis yang menentukan berhasil tidaknya suatu usaha. Manajer harus menetapkan standar untuk tiap-tiap objek yang akan dikendalikan. Ketika menetapkan standar maka spesifikasi mulai pada puncak organisasi akan melibatkan setiap tingkat dari pegawai. Melibatkan pegawai dalam penetapan standar untuk membuat komite pegawai untuk pencapaian standard dan hasil dalam banyak hal sesuai dengan standar.

Dua tipe standar yang diakui ialah standar keluaran (output standards) dan standar masukan (input standards) standar keluaran mengukur hasil kinerja (informatic results) berupa kuantitas, kualitas, biaya dan waktu; sebaliknya standar masukan mengukur masukan usaha-usaha kerja (work efforts) yaitu pelaksanaan tugas. Bahwa standar dalam pengendalian manajemen secara langsung harus berasal dan dikembangkan dari tujuan-tujuan organisasional yang ditetapkan dalam rencana.

Jadi tujuan organisasi digunakan sebagai standar dalam pengendalian. Indikator-indikator kinerja dapat diturunkan dari tujuan-tujuan, seperti halnya garis besar standar apa yang ditentukan berdasarkan karakteristik kuantitatif dan kualitatif yang lebih jelas tampak pada keluaran, tingkat kualitas, tingkat inventori atau indikator lain tentang kinerja individu dan atau kinerja keorganisasian.

Mengukur Kinerja Aktual

Pada tahap kedua, manajer memonitor dan mengukur kinerja atau tampilan kerja aktual. Dalam praktik manajer dapat mengukur atau mengevaluasi dua hal:

(1) keluaran actual yaitu hasil dari perilaku dari anggotanya. Dan (2) perilaku itu sendiri. Untuk melaksanakan tahap ini perlu ditetapkan prosedur, waktu dan metode-metode atau teknik-teknik pengukuran kinerja yang efektif atau tepat digunakan. Kinerja yang diukur dapat berupa kinerja individu, kinerja kelompok, dan kinerja organisasi. Kinerja ini dapat diukur perjam, perhari, perminggu, perbulan, pertriwulan, persemester atau pertahun sesuai dengan kebutuhan. Meskipun demikian, masing-masing sumber informasi dalam mengukur kinerja tidak selalu berdiri sendiri, tetapi akan lebih efektif apabila dilakukan secara kombinasi atau terpadu untuk memungkinkan mendapatkan informasi yang dapat dipercaya.

Agar pelaksanaan pengukuran kinerja berlangsung dengan tepat maka perlu dikumpulkan data dan mendeteksi lokasi permasalahan ini disebut monitoring performance atau pemantauan kinerja. Untuk mengukur dan mengumpulkan data tentang kinerja actual, metode yang sering digunakan oleh manajer ialah observasi pribadi, wawancara dan angket. Sementara itu sumber informasi yang sering digunakan oleh manajer ialah laporan – laporan lisan, laporan – laporan tertulis dan laporan – laporan statistik. Jika data atau informasi sudah dikumpulkan melalui individu, kelompok atau unit kerja yang kinerjanya dipengendalian harus diuji validitasnya. Sebab ada kemungkinan karyawan atau manajer akan memberi data palsu jika mereka tahu bahwa hasil yang negative akan digunakan untuk memindahkan atau mendonasi mereka.

Membandingkan Kinerja Actual dan Standar

Tahap ketiga ialah membandingkan hasil kinerja actual dengan standar. Untuk itu dibutuhkan standar yang jelas dan pasti yang digunakan sebagai ukuran yang akan diperbandingkan. Apabila standar tidak jelas maka sulit untuk memiliki tingkat kinerja yang akan dicapai. Membandingkan kinerja

actual dengan kinerja yang diinginkan dimaksudkan untuk mengetahui apakah kinerja actual lebih kecil, sama dengan atau lebih besar dari kinerja yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa membandingkan menentukan derajat dari variasi antara kinerja actual dan standar. Hasil dari membandingkan kinerja actual dan standar mengarah pada dua kemungkinan : pertama secara signifikan konsisten dengan standar atau lebih. Dan kedua secara signifikan berada dibawah standar. Menentukan batas yang dapat diterima berkenaan dengan range of variation yaitu parameter variasi yang dapat diterima antara kinerja actual dan standar adalah sesuatu yang kritis. Tetapi menjadi keharusan bahwa ketika membandingkan kinerja actual dan standar perlu menentukan batas yang dapat diterima tentang derajat penyimpangan.

Tindakan Perbaikan Atau Penyesuaian

Tahap ketiga dan final dalam proses pengendalian ialah mengambil tindakan apakah perbaikan atau penyesuaian tergantung pada hasil membandingkan kinerja actual dengan kinerja yang digunakan.

Derajat perbedaan antara kinerja actual dengan kinerja yang diinginkan akan menentukan tindakan perbaikan atau penyesuaian atau menentukan kebutuhan untuk tindakan. Satu cara yang baik untuk menentukan derajat atau besarnya kebutuhan tindakan adalah menggunakan pengendalian.

Singkatnya, jika hasil kinerja sesuai dengan standar maka respon yang tepat dari manajer adalah mengakui kinerja dapat diterima dan memelihara status quo dan kemudian melakukan monitor dan mengukur pelaksanaan dan hasil kerja. Dalam hal ini individu, kelompok atau departemen unit kerja secara normal melanjutkan tugasnya tanpa suatu perubahan yang berarti, jika hasil – hasil kinerja actual menyimpang dari, tidak sesuai dengan atau belum mencapai standar yang dilakukan sampai batas control

tolerance, maka manajer melakukan tindakan perbaikan atau penyesuaian hingga mengubah standar yang digunakan.

Hasil yang berbeda oleh adanya penyimpangan tidak boleh ditunda, dimaafkan, dikompromikan tetapi harus sesegera mungkin ditangani dan diperbaiki sebab itu adalah keharusan. Tindakan perbaikan mungkin dalam hal perencanaan seperti perubahan dalam memotivasi pekerja untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman baru atau lebih mendalam atas kebijaksanaan yang ada. Mungkin juga perubahan dalam prosedur atau cara baru mengecek hasil, cara mendapatkan hasil terbaik, perbaikan penyimpangan harus disertai dengan tanggung jawab dan individu. Tanggung jawab disesuaikan dengan tugas yang dipikul, sehingga mendapatkan hasil yang optimal.

Jadi pengendalian hanya mempunyai arti yang kecil kecuali jika diambil tindakan perbaikan terhadap penyimpangan dari rencana. Melakukan tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan yang berarti wajib dilakukan oleh manajer. Ada dua tipe tindakan koreksi yang dapat dilakukan terhadap kinerja aktual jika terjadi penyimpangan : melakukan tindakan korektif segera (immediate corrective action) atau melakukan tindakan koreksi terhadap berbagai hal yang masih merupakan gejala – gejala. Karena itu tindakan perbaikan ini dilukiskan sebagai putting out fires. Tindakan koreksi mendasar melihat pada bagaimana dan mengapa kinerja menyimpang dan kemudian memperbaiki sumber deviasi. Jadi tindakan koreksi terhadap deviasi dilakukan dengan terlebih dahulu mencari serta mendapatkan sumber – sumber informan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.

Melalui tindakan koreksi atas suatu penyimpangan diharapkan pelaksanaan kerja akan menjadi berjalan sesuai dengan rencana. Jika ada perbedaan atau penyimpangan antara hasil dan standar harus diputuskan pemecahan mana yang akan dilakukan, artinya perlu

dipertimbangkan apakah penyimpangan tersebut merupakan penyimpangan berarti atau tidak berarti. Untuk itu perlu dilakukan diagnosis termasuk diagnosis atas sebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan dan hasil dari standar. Hasil diagnosis ini kemudian dijadikan sebagai dasar tindakan perbaikan. Diagnosis ini mencakup antara lain penilaian type, jumlah, tempat dan sebab penyimpangan dari standar. Beberapa potensial dari penyimpangan kerja antara lain : salah perencanaan, kurang komunikasi dalam organisasi, seperti halnya regulasi pemerintah atau kompetisi.

Tindakan mengatasi persoalan lebih baik dari pada tindakan korektif. Sebab tindakan terakhir dari proses pengendalian lebih banyak meliputi tindakan mencari sumber kesulitan dan mengoreksinya.

Oleh sebab itu tujuan pengendalian yang sesungguhnya antara lain :

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan sumber – sumber dan pelaksanaan tugas sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai.
2. Mencegah agar pelaksanaan kerja tidak menyimpang dari prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang dan mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengawasan atau pengendalian merupakan kegiatan untuk mengukir kinerja actual, membandingkan dengan standard an melakukan tindakan perbaikan jika kinerja actual lebih kecil dari standar atau melakukan tindakan pengembangan / penyesuaian untuk

meningkatkan kinerja jika kinerja actual sama dengan atau lebih besar dari standar atau dengan kata lain jika dalam pengawasan program pembangunan tempat ibadah di Desa Wanga Kecamatan Motoling ditemukan hasilnya tidak mencapai standar atau tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka akan dilakukan perbaikan atau pengembangan terhadap kinerja sebelumnya.

2. Pengawasan atau pengendalian penting bukan hanya karena memberi informasi tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan organisasi tetapi juga menjamin bahwa organisasi dan tindakan-tindakan anggotanya bergerak ke arah tujuan yang sudah ditetapkan. Melalui pengamatan atau pengendalian sudah diperbaiki tingkat inovasi dalam suatu organisasi dan pada akhirnya pengawasan atau pengendalian membuat informasi mengenai perkembangan organisasi dalam pencapaian tujuan hingga tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
3. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan atau pengendalian manajer dapat memilih untuk menggunakan berbagai teknik pengendalian seperti pengawasan atau pengendalian perilaku dan keluaran, pengendalian preaktif dan represif, birokratik dan organik, masukan, transformasi dan keluaran.
4. Pengawasan atau pengendalian efektif jika tahap-tahap pengendalian diikuti dan dilakukan dengan benar, menggunakan teknik pengawasan atau pengendalian secara simultan atau menetapkan system pengawasan ganda dan didasarkan pada asas-asas pengendalian
5. Untuk melakukan pengawasan program pembangunan tempat ibadah, pengawasan keuangan di Desa Wanga Kecamatan Motoling dilakukan dengan mengikuti prosedur atau tahapan yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan

dengan benar dengan demikian akan menghasilkan hasil yang benar sesuai apa yang diharapkan atau direncanakan.

Saran

1. Pengawasan dilakukan untuk mengukur / mengevaluasi sejauh mana kinerja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi apakah mereka sudah melakukan pekerjaan sesuai standar yang telah ditetapkan atau belum. Dan jika ternyata bahwa hasil pengawasan yang dilaksanakan menunjukkan kinerja aktual lebih kecil dari standar atau dengan kata lain bahwa apa yang dikerjakan oleh komisi pembangunan di jemaat GMIM Sion desa wanga belum mencapai sebagaimana apa yang diharapkan maka disarankan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan tempat ibadah di desa wanga untuk segera melakukan perbaikan – perbaikan terhadap berbagai kekurangan yang ada
2. Hasil pengawasan serta rekomendasi oleh Badan Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan kinerja komisi dan panitia pembangunan dalam melaksanakan tugas-tugas gerejawi yang telah diamanatkan dan diharapkan pula agar dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, L. J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Muchsan. 2007. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty
- Nasution, S. 2001. *Metode Research*, Jakarta : Bumi Aksara

Siagian sondang 1990 organisasi
kepemimpinan dan perilaku
administrasi

Sunarno, Siswanto. 2005, Hukum
Pemerintahan Daerah, Jakarta :
Sinar Grafika

Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian
Kualitatif*. Bandung : Alfa Beta

Sumber Lain:

Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1980
tentang Pelaksanaan Pengumpulan
Sumbangan